



bangga
melayani
bangsa

Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Rancangan **Akhir** Perubahan Renja 2024





WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 04);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024, dijadikan sebagai:
 - a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2024, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan rencana kerja.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - c. BAB I Pendahuluan;
 - d. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
 - e. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - f. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - g. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - h. BAB VI Penutup.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juli 2024
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
MARNABAS

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 494

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19800509 200604 1 011



WALI KOTA SAMARINDA

Yth

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
5. Camat Se-Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang

**Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024**

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kota Samarinda.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2024;
3. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai dengan sistematika penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (Lampiran 2)
4. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Lampiran 3.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juni 2024

WAKIL WALI KOTA,



RUSMADI

Lampiran 1

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
9. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
13. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
14. Dinas Perikanan Kota Samarinda
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
16. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
20. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
21. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
22. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
26. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
29. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
30. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
31. Kecamatan Palaran
32. Kecamatan Samarinda Ilir
33. Kecamatan Samarinda Seberang
34. Kecamatan Samarinda Utara
35. Kecamatan Samarinda Ulu
36. Kecamatan Sungai Kunjang
37. Kecamatan Sambutan
38. Kecamatan Sungai Pinang
39. Kecamatan Samarinda Kota
40. Kecamatan Loa Janan Ilir

Lampiran 2

Surat Edaran Wali Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/1592 /300.01

Tentang : Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
Tahun 2024

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

BAB I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

BAB IV Penutup

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan. Dahlia Komplek Perkantoran Balaikota

Telp.(0541)733926 Fax.(0541)733986

S A M A R I N D A

Kode Pos. 75121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : 800/3333/300.02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka persiapan dan tahapan penyusunan Renja perlu dibentuk Tim penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Repblik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneisa Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/II/18/2/2021/);

23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra SKPD;
2. Menganalisis kinerja pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
3. Mengidentifikasi isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi serta dampak terhadap pencapaian visi, misi serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Samarinda;

4. Mereview terhadap Rancangan Awal RKPD;
5. Melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diperoleh dari hasil musrenbag tahun 2024;
6. Menyusun Renja dan Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024;

KETIGA : Tim Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH



IBROHIM, SE, M.Si
NIP. 19650502 198902 1 004

Tembusan Yth:

1. Walikota Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
3. Inspektur Daerah Kota Samarinda;
4. BAPPEDALITBANG Kota Samarinda;

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala BPKAD	Ketua
2	Sekretaris BPKAD	Sekretaris
3	Kabid. Anggaran	Anggota
4	Kabid. Perbendahraan	Anggota
5	Kabid. Akuntansi	Anggota
6	Kabid. Aset	Anggota
7	Perencana Ahli Muda	Anggota
8	Subbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota
10	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli	Anggota
12	Penilaian Pemerintah Ahli Muda	Anggota



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Rancangan Akhir Renja ini disusun dengan mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja ini, diuraikan tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, pendanaan, dan indikator kinerja dari masing-masing satuan unit kerja di lingkungan BPKAD Kota Samarinda yang terdiri dari 4 (empat) Bidang. Oleh karena itu, Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini perlu disusun sebagai komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh satuan unit kerja.

Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 ini disusun sebagai penjabaran dari sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024. Dokumen ini akan dilaksanakan oleh BPKAD Kota Samarinda sebagai dasar atau tahapan awal untuk menyusun Rancangan Akhir Renja setelah dilakukan pembahasan dalam Forum SKPD maupun Musrenbang RKPD, dan akan menjadi dokumen akhir Renja (final) setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2024.

Samarinda, 5 September 2024

Kepala BPKAD Kota Samarinda

H. IBROHIM, SE, M.Si

NIP.19650502 198902 1 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	12
2.1 Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Tabel Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31
BAB 4 PENUTUP	32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) yang selanjutnya disebut Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) adalah dokumen perencanaan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) untuk menyusun Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Samarinda.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.



Renja BPKAD Kota Samarinda juga merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Renja BPKAD Kota Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka prioritas dan rencana kerja pembangunan daerah beserta pendanaannya.

Bagi BPKAD Kota Samarinda, Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Ranwal Renja BPKAD dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2024. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2025, RPJP Pemerintah Kota Samarinda, RPJMD Pemerintah Kota Samarinda, dan Ranwal RKPD Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2024 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Sebagai rancangan awal dokumen resmi Pemerintah Daerah, Ranwal Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Ranwal RKPD dan Ranwal Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD). Sebagai rencana operasional, Ranwal RKPD merupakan pedoman awal dalam penetapan RKPD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD.

Selanjutnya Rankir Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renja SKPD melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah maupun Musrenbang RKPD yang kedepannya dijadikan acuan dalam penyusunan RKA SKPD dan kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024.



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 47 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Startegis Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Oraginisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, dimana BPKAD Kota Samarinda merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.

Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai *perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda* yaitu misi ke-3: **"Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntable dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat"**.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2023 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024, difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kota Samarinda merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.

Dasar Pertimbangan Perubahan

Renja Perubahan BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa pertimbangan strategis yang berkaitan dengan perubahan kebijakan, dinamika ekonomi, dan hasil evaluasi kinerja tahun berjalan. Berikut adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan perubahan:

a. Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah

Adanya kebijakan baru di tingkat nasional dan daerah memengaruhi perencanaan pengelolaan keuangan dan aset. Sebagai contoh, regulasi fiskal yang diterbitkan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer lainnya, dapat berdampak langsung pada pendapatan dan pengelolaan belanja daerah. Di tingkat daerah, perubahan kebijakan terkait prioritas pembangunan juga memerlukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran dan strategi pengelolaan aset.



b. Kondisi Ekonomi Makro dan Mikro

Perubahan dalam kondisi ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya tingkat inflasi, memberikan tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Hal ini mengharuskan penyesuaian rencana pengeluaran dan strategi peningkatan PAD agar dapat menyeimbangkan kebutuhan belanja daerah dengan sumber daya yang tersedia.

c. Dinamika Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah yang dinamis membutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kebutuhan pembangunan yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penanggulangan dampak sosial-ekonomi akibat pandemi, memerlukan penyesuaian dalam alokasi anggaran dan strategi pengelolaan aset yang lebih adaptif.

Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah Kota Samarinda pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan yang berpengaruh pada penyusunan Renja BPKAD, antara lain:

- a. **Pertumbuhan Ekonomi:** Diproyeksikan terjadi pemulihan ekonomi pasca pandemi, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya stabil. Ketergantungan ekonomi Samarinda pada sektor pertambangan dan energi *memerlukan perhatian khusus, mengingat fluktuasi harga komoditas.*
- b. **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dihadapkan pada tantangan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Selain itu, peran investasi dan kontribusi sektor swasta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan PAD.
- c. **Dana Transfer Pusat:** Kebijakan pemerintah pusat mengenai transfer dana ke daerah, terutama terkait alokasi DAU dan DAK, masih dipengaruhi oleh upaya desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan publik yang lebih efektif.
- d. **Inflasi dan Biaya Hidup:** Inflasi yang meningkat diperkirakan akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta biaya operasional pemerintah. Ini memerlukan penyesuaian dalam penganggaran untuk mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
7. Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026. (Noreg Peraturan Daerah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur: 64.72/I/18/2/2021/);
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 121 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menyesuaikan rencana kerja BPKAD sesuai dengan perkembangan terkini yang memerlukan penyesuaian strategi dalam rangka:

- a. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan: Penyesuaian dilakukan untuk menjamin bahwa program-program yang dilaksanakan BPKAD sejalan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah terkini. Dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal, diharapkan anggaran dapat dialokasikan secara lebih tepat guna.
- b. Merespons Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah: Perubahan kebijakan di tingkat pusat dan daerah, termasuk regulasi fiskal dan pengelolaan aset, menuntut BPKAD untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi perencanaan dan implementasi program kerja agar tetap sejalan dengan arah kebijakan tersebut.
- c. Menjaga Keseimbangan Fiskal Daerah: Dalam konteks perubahan ekonomi yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pusat, Renja Perubahan BPKAD perlu memastikan pengelolaan fiskal daerah tetap stabil, dengan kebijakan yang fleksibel terhadap fluktuasi ekonomi.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan BPKAD Tahun 2024 adalah:

- a. Menyesuaikan Target Kinerja: Agar lebih realistis dengan mempertimbangkan perubahan alokasi anggaran dan kondisi ekonomi daerah.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset: Melalui perencanaan yang adaptif dan tanggap terhadap kebutuhan pembangunan.
- c. Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah: Menjadikan BPKAD sebagai aktor utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan pengelolaan aset yang produktif.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang maksud, tujuan dan dasar Pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Memuat kompilasi evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (BPKAD) Kota Samarinda

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA (BPKAD) KOTA SAMARINDA

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda di tahun 2024 sampai dengan Triwulan II secara umum masih selaras dengan dinamika yang ada setelah melalui penyelarasan dan penyempurnaan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan kinerja yang optimal, selaras dan masih on the track dengan target serta capaian yang diharapkan. Ini dapat dilihat dari berjalannya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidental/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait penunjang pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penunjang pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidental/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena Badan



Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani masyarakat umum guna menunjang capaian program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi pertimbangan hasil kajian, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Dalam pelaksanaan serta evaluasi yang berjalan, beberapa program / kegiatan perlu adanya perubahan pada rencana kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda guna mengakomodasi serta menyelaraskan terhadap berbagai dinamika kebutuhan prioritas yang berkembang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dengan penyesuaian atas APBD Tahun 2024.

Perubahan rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024, dinamika kebutuhan yang sedang berkembang serta faktor efisiensi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan optimalisasi capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada.

Pada tahun 2024 belanja operasi diarahkan guna mendanai program dan kegiatan sesuai bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah dengan tujuan dan target sasaran yang jelas guna mendukung arah kebijakan pemerintah daerah Kota Samarinda Tahun 2024. Sedangkan untuk belanja pegawai, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.



Adapun alokasi serta realisasi Pelaksanaan Renja PD sampai Triwulan II (Semester I) tahun 2024 pada Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	85	85
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	73 Nilai	50.75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP	1 dokumen	1 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	12 Laporan	6 Laporan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	81 Orang
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 orang	52 orang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	7 Laporan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 Laporan	2 Laporan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4800 Surat Kabar Dokumen	2400 Surat Kabar Dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	6 Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RaJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 SPPD	28 SPPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan	1 Laporan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	20 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 Laporan	1 Laporan



	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	18 Laporan
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	12 Laporan	6 Laporan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	18 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	18 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang di Verifikasi	1 dokumen	0 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	2 Dokumen	0 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	0 orang
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku	5 Jenis Buku



	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 laporan	1 laporan
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	1 laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	1 Dokumen
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 org	200 org
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	3 buku	3 buku
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	36 Laporan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen



	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	9 Laporan
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	5 Laporan
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	2 Dokumen	0 Dokumen
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	0 Orang
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	13 Lembaga	0 Lembaga
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0 Laporan	0 Laporan
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 Laporan	3 Laporan
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	150 Orang	0 Orang
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan



	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	0 Laporan
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ SubKegiatan (Specific Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan II Tahun 2024
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang

Sumber: E-Dalev, 2024.

Tingkat rata - rata capaian kinerja dan realisasi anggaran pada evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II masih menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja 65,51% dan Realisasi Anggaran Renja OPD 46,99%. Namun evaluasi kinerja ini dikalkulasi dengan indikator kinerja output melalui besaran serta capaian output yang telah terealisasi terhadap target yang telah ditentukan. Evaluasi capaian kinerja outcome akan berpengaruh lebih signifikan untuk menunjukkan predikat kinerja lebih baik yang telah dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda sebagai unit penunjang di bidang Pengelolaan Keuangan . Realisasi dari target output yang ditetapkan tidak selalu berbanding lurus dengan proyeksi perencanaan di awal, hal ini dikarenakan sebagian besar dari kegiatan yang ada pada rencana kerja merupakan kegiatan rutin penyediaan yang tidak terduga atau situasional/insidentil mengacu pada dinamika kebutuhan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota samarinda optimis on the track atas semua pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda pada tahun berjalan ini dilakukan demi mencapai optimalisasi dan keselarasan. Efisiensi serta rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang memungkinkan terwujudnya optimalisasi capaian kinerja pada program kegiatan lebih diprioritaskan berpedoman pada peraturan dan kebijakan yang ada. Hal ini dapat dimonitor dari evaluasi berkala atas semua program kegiatan yang ada terhadap target capaian yang diharapkan.



2.2. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan isu-isu strategis terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, telah dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/ kegiatan/ sub kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diusulkan melalui mekanisme perencanaan dalam Musrenbang mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, sampai dengan Kota Samarinda. Berdasarkan proses musrenbang tersebut, maka pada tahun anggaran 2024 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari usulan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena usulan program tersebut bersifat teknis dan langsung kepada masyarakat, sehingga pada tahun 2024 penyalurannya hanya terdapat pada Perangkat Daerah teknis, dan tidak terdapat pada Perangkat Daerah pendukung seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Kode (Perangkat Daerah/ Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K		Rp	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan									
5.02.0.00.0.00.02.0000			KEUANGAN								
5.02.0.00.0.00.02.0000			PROGRAM-PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH								
5.02.0.00.0.00.02.0000				Laporan Keuangan Daerah	1						
5.02.0.00.0.00.02.0000			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								
5.02.0.00.0.00.02.0000				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2	Dokumen					
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000			1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS								
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000			1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS								
5.02.0.00.0.00.02.0000				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	Dokumen					
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000			3 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD								
5.02.0.00.0.00.02.0000				Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen					
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000			4 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD								
5.02.0.00.0.00.02.0000				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen					
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000			5 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD								
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen							
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000	6 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD										
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1	Dokumen							
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000	7 APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD										
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen							

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi s/d Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
			K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya								
5.02.0.00.0.00.02.0000			1 Dokumen			1		1		100
5.02.0.00.0.00.02.0000										
5.02.0.00.0.00.02.0000		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank								
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)								
5.02.0.00.0.00.02.0000			1 Laporan			1		1		100
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi Pelaksanaan Plutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas									

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
			K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen			1		100	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			429.664.500 PAD			49.600.000	100	20.88
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen			1		100	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			715.120.950 PAD			457.016.875	100	63.91
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen			1		100	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			159.135.000 PAD			150.464.500	100	94.55
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang			200		100	
Rata-rata capaian kinerja (%)									
Predikat Kinerja									
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			2.018.362.250			576.366.249	100	43.94
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	3 Jenis Buku			3		100	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			315.617.750 PAD			142.547.750	100	64.38
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan			36		100	

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)				Realisasi s/d Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
						K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		159,135,000	PAD		105,631,807		105,631,807		100	66.38
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	2	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen			12		12		100		
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		106,090,000	PAD		20,030,000		23,030,000		50	21.71
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	3	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan			9		9		50		
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		424,360,000	PAD		109,300,000		250,060,000		55.56	58.93
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	4	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan			5		5		55.56		
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		53,045,000	PAD		-		0		0	0
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	7	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen			0		0		0		
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		106,090,000	PAD		26,210,000		26,210,000		100	24.71
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	8	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen			1		1		100		
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah		111,394,500	PAD		58,296,000		58,296,000		100	52.33
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	9	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah	3 Dokumen			3		3		100		
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota		530,450,000	PAD		84,040,604		190,046,777		0	35.83

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)				Realisasi s/d Triwulan II				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
						K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah		2,328,860,000	PAD		79,750,000				604,040,000	100	25.94			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	8	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan			1		1				100				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			0											
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	9	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan					0				0	0	0	0	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		472,645,000	PAD		103,299,000				226,969,000	100	48.02			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	10	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen					1				100				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			0							0	0	0	0	
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	11	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan									0				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		435,505,000	PAD		102,243,430				205,677,094	100	47.23			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	12	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			1		1				100				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		898,080,000	PAD		182,618,260				252,013,260	100	28.06			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	3	2.01	13	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang					150				100				
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat Kinerja																				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN(PROGRAM 3)																				
Predikat Kinerja																				
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		55,324,202,672			20,057,889,230				31,112,148,353	100	56.24			
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	2	1			Nilai IKM	85 Nilai			85						100				

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realisasi s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		
			K	Rp	Sumber Dana	K	Rp	K		Rp	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP		250,000,000			62,260,000	95,132,000	69.52	38.05	
5.02.0.00.0.00.02.0000						50.75		50.75	69.52		
5.02.0.00.0.00.02.0000				125,000,000	PAD		5	56,725,000		100	46.18
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		75,000,000	PAD		2,325,000	23,192,500	100	30.92	
5.02.0.00.0.00.02.0000						1				100	
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000	PAD		3,210,000	14,211,500	100	28.42	
5.02.0.00.0.00.02.0000						4				100	
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000											
Rata-rata capaian kinerja (%)											
Predikat Kinerja											
5.02.0.00.0.00.02.0000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan		34,244,319,442			14,297,867,863	16,975,817,082	50	49.57	
5.02.0.00.0.00.02.0000						6				50	
5.02.0.00.0.00.02.0000				31,654,456,177	PAD		81	13,386,557,377	16,043,760,946	100	50.68
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2,539,863,265	PAD		900,887,136	900,887,136	100	35.47	
5.02.0.00.0.00.02.0000						52				100	
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000				50,000,000	PAD		7	10,423,350	31,169,000	100	62.34
5.02.0.00.0.00.02.0000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"									
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000											
5.02.0.00.0.00.02.0000											

Kode (Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Perangkat Daerah/ Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)		Realiasi s/d Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)
			K	Rp	Sumber Dana	K	Rp		
Predikat Kinerja									
5.02.0.00.0.00.02.0000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,700,000,000			430,549,000		R S
5.02.0.00.0.00.02.0000		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	1 Laporan			1		1	100
5.02.0.00.0.00.02.0000	Pengadaan Mebel			1,700,000,000 PAD			430,549,000		88.56
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit			20		20	26.67
Rata-rata capaian kinerja (%)									
26.67 88.56									
Predikat Kinerja									
5.02.0.00.0.00.02.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4,729,883,230			955,538,897		SR T
5.02.0.00.0.00.02.0000		Laporan Penyediaan Jasa	4 Laporan			2		2	50
5.02.0.00.0.00.02.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1,211,175,800 PAD			242,775,497		0.5
5.02.0.00.0.00.02.0000		36 Bukti Pembayaran 36 Bukti Pembayaran LaporanLaporan							39.18
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18		18	0.5
5.02.0.00.0.00.02.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3,518,707,430 PAD			712,763,400		60
5.02.0.00.0.00.02.0000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 bukti pembayaran Laporan			3		3	60
Rata-rata capaian kinerja (%)									
30.25 33.59									
Predikat Kinerja									
5.02.0.00.0.00.02.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9,850,000,000			3,296,352,510		SR SR
5.02.0.00.0.00.02.0000		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan			6		6	50
5.02.0.00.0.00.02.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			450,000,000 PAD			207,599,000		27.27
256,214,000 56.94									

Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
No	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	32.625.411.590	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Keuangan Daerah	1 Laporan	12.848.105.445	Bidang Anggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (murni dan Perubahan)	3.038.679.400	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen (murni dan Perubahan)	2.765.198.254	Bidang Anggaran
3	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	187.872.200	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	170.963.702	Bidang Anggaran
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	181.770.100	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	165.410.791	Bidang Anggaran
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	325.608.100	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	296.303.371	Bidang Anggaran
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	128.949.200	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	117.343.772	Bidang Anggaran
7	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	109.694.400	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	99.821.904	Bidang Anggaran
8	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	58.733.300	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Perubahan DPAP-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	53.447.303	Bidang Anggaran
9	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali	347.149.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali	315.906.045	Bidang Anggaran
10	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali	281.887.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Samarinda	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Perda dan Perwali	256.517.625	Bidang Anggaran
11	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi	744.088.500	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi	677.120.535	Bidang Anggaran
12	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 SKPD	672.926.600	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	47 SKPD	612.363.206	Bidang Anggaran
13	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku	2.831.044.440	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	5 Jenis Buku	2.576.250.441	Bidang Perbendaharaan
14	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Laporan	53.045.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Laporan	48.270.950	Bidang Perbendaharaan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
No	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	Program, Kegiatan dan Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	53.045.000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	48 270 950	Bidang Perbendaharaan	
16	Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 OPD	370.890.640	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47 OPD	337 510 482	Bidang Perbendaharaan	
17	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 Laporan	53.045.000	Penatausahaan Pembayaan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembayaan Daerah	1 Laporan	48 270 950	Bidang Perbendaharaan	
18	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan	179.209.350	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan	163 080 509	Bidang Perbendaharaan	
19	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	658.754.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	599 466 140	Bidang Perbendaharaan	
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	106.090.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Laporan	96 541 900	Bidang Perbendaharaan	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Koordinasi Pelaksanaan Rutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Pemotongan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Rutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Pemotongan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Laporan	53.045.000	Koordinasi Pelaksanaan Rutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Pemotongan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Rutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembayaran dan Pemotongan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Laporan	48.270.950	Bidang Perbendaharaan	
22	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Laporan	429.664.500	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Laporan	390.994.695	Bidang Perbendaharaan	
23	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Samarinda	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	715.120.950	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kota Samarinda	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	650.760.065	Bidang Perbendaharaan	
24	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perwali	159.135.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Perwali	144.812.850	Bidang Perbendaharaan	
25	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku Laporan Keuangan	2.018.362.250	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	3 Jenis Buku Laporan Keuangan	1.830.317.250	Bidang Akuntansi	
26	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	315.617.750	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36 Laporan	315.617.750	Bidang Akuntansi	
27	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO, dan Beban	34 Laporan	159.135.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan- LO dan Beban	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan- LO, dan Beban	34 Laporan	159.135.000	Bidang Akuntansi	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
No	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	106.090.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	78.090.000	Bidang Akuntansi	
29	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	424.360.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	9 Laporan	424.360.000	Bidang Akuntansi	
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Sidang dan 4 Laporan	53.045.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Sidang dan 4 Laporan	-	Bidang Akuntansi	
31	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Buku	106.090.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Buku	106.090.000	Bidang Akuntansi	
32	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Regulasi	111.394.500	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3 Regulasi	111.394.500	Bidang Akuntansi	
33	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	530.450.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	463.450.000	Bidang Akuntansi	
34	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 BLUD	212.180.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	12 BLUD	172.180.000	Bidang Akuntansi	
35	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 Jenis Laporan	737.325.500	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Rekonsiliasi Laporan Penerimaan OPD	3 Jenis Laporan	676.339.500	Bidang Akuntansi	
36	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	368.662.750	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	320.662.750	Bidang Akuntansi	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan						Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	368.662.750	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	368.662.750	Bidang Akuntansi	
38	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	74.998.000.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Laporan Neraca Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	70.897.325.520	Bidang Aset	
39	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	74.998.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	1 Dokumen	70.897.325.520	Bidang Aset	
42	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 OPD	26.350.727.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	47 OPD	23.979.161.570	Bidang Aset	
43	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Regulasi	216.169.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Regulasi	196.713.790	Bidang Aset	
44	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	15.141.791.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	13.809.029.810	Bidang Aset	
45	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	441.495.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	436.760.450	Bidang Aset	
46	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Sertifikat Tanah & 70 Patok Tanah	28.712.728.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Sertifikat Tanah & 70 Patok Tanah	28.712.728.000	Bidang Aset	
47	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 daftar	2.328.860.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	3 daftar	2.119.262.600	Bidang Aset	
49	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Laporan & 2000 BMD	472.645.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Laporan & 2000 BMD	430.106.950	Bidang Aset	
50	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	435.505.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Dokumen	396.309.550	Bidang Aset	
51	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	32.625.411.590	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	817.252.800	Bidang Aset	
52	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Samarinda	Nilai IKM	81	55.324.202.672	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Samarinda	Nilai IKM	81	62.794.430.173	Sekretariat	
53	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	80	250.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Nilai AKIP	80	301.325.000	Sekretariat	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
54	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	125.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	187.575.000	Sekretariat
55	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	68.250.000	Sekretariat
56	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	45.500.000	Sekretariat
57	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	34.244.319.442	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah Laporan	7 Laporan	41.211.484.943	Sekretariat
58	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	31.654.456.177	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	38.626.121.678	Sekretariat
59	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang	2.539.863.265	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang	2.539.863.265	Sekretariat
60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	45.500.000	Sekretariat
61	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan	7 Laporan	4.550.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Samarinda	Jumlah laporan	7 Laporan	4.745.712.000	Sekretariat
62	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peralatan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	300.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peralatan Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	300.000.000	Sekretariat
63	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	1.900.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	2.095.712.000	Sekretariat
64	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Jenis	350.000.000	Sekretariat
65	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen	800.000.000	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Dokumen	800.000.000	Sekretariat
66	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	4.800 Surat Kabar	50.000.000	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Undangan	Kota Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Undangan yang Disediakan	4.800 Surat Kabar	50.000.000	Sekretariat

No	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Catatan Penting
			Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program, Kegiatan dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	67 Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Rombongan	250.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Rombongan	250.000.000	Sekretariat	
68	68 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 SPPD	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 SPPD	900.000.000	Sekretariat	
69	69 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	1.700.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	3 Laporan	1.700.000.000	Sekretariat	
70	70 Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	1.700.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	75 Unit	1.700.000.000	Sekretariat	
71	71 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.729.883.230	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.846.508.230	Sekretariat	
72	72 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Bukti Pembayaran	3.518.707.430	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Bukti Pembayaran	3.635.332.430	Sekretariat	
73	73 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	159 Unit	9.850.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Samarinda	Laporan Pemeliharaan	159 Unit	9.989.400.000	Sekretariat	
74	74 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	1.038.400.000	Sekretariat	
75	75 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	1.038.400.000	Sekretariat	
76	76 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	1.100.000.000	Sekretariat	
77	77 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	3.500.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	3.600.000.000	Sekretariat	
78	78 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	3.800.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Jenis	3.800.000.000	Sekretariat	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN (BPKAD) KOTA SAMARINDA

3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Samarinda di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kota Samarinda, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kota Samarinda agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kota Samarinda, maka BPKAD Kota Samarinda merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2024. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD



Kota Samarinda Tahun 2024, yaitu Pembangunan SDM dan Penguatan Berbasis Kawasan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai table berikut:

Misi 3	Sasaran	Strategi	Indikator Kinerja Sasaran	Program Prioritas
Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Opini Laporan Keuangan	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan matriks RKPD Kota Samarinda Tahun 2024, maka BPKAD Kota Samarinda melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:
 1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2023), perencanaan, kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan



4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA BPKAD KOTA SAMARINDA

Renja BPKAD Kota Samarinda tahun 2024 mengacu pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026, yang selanjutnya mengacu pada RKPD Kota Samarinda tahun 2023.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan PD:

Meningkatnya kualitas penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, standar satuan harga, analisa standar belanja, dan Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel.

Sasaran PD:

Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Indikator Sasaran: Opini Laporan Keuangan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kota Samarinda sebagai unsur penunjang di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kota Samarinda ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan target dan penjabaran sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi Operasional)	Target						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2						
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja							
Opini Laporan Keuangan	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Formulasi= Opini BPK terhdap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda							



No	Misi/ Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capai Kinerja		
			Target Renja 2024	Target Perubahan Renja 2024	Kondisi Akhir RPJMD
	Misi: Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipan masyarakat.				
	Tujuan				
1	Meningkatnya Pelayanan yang Akuntabel	Nilai LPPD	3,4%	3,4%	3,55%
	Sasaran				
1	Meningkatnya kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	WTP	WTP	WTP

3.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan BPKAD Kota Samarinda pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.



Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (business process) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kota Samarinda, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD). Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD).
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - c. Evaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD), dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;



- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu; dan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Pengadaan Mebel
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan
 - d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.



Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota.
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - c. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;
 - e. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - f. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);



- h. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - i. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - j. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - k. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
 - f. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
 - i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
 - b. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.



5. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:

- a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD): Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Inventarisasi Barang Milik Daerah;
5. Pengamanan Barang Milik Daerah;
6. Penilaian Barang Milik Daerah;
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
8. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan



9. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 tetap mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah dan dinamika yang berkembang terkait situasi Penanganan Inflasi Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Rencana kerja ini akan mengakomodir usulan proyeksi anggaran perubahan yang diprioritaskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya akan ditetapkan masing-masing plafon anggaran per kegiatan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan rencana kerja ini juga akan mengakomodir adanya beberapa pergeseran belanja pada beberapa kegiatan guna penyesuaian atas kondisi-kondisi yang terjadi pada APBD Tahun 2024. Dinamika yang sedang berkembang memerlukan langkah rasionalisasi pada beberapa belanja kegiatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan capaian kinerja pada belanja kegiatan lain yang lebih prioritas dengan berpedoman pada peraturan/kebijakan yang ada. Sedangkan untuk belanja tidak langsung juga diakomodir dalam rencana kerja tahun 2024, pengalokasian anggaran dalam bentuk belanja pegawai yang rutin diperuntukkan sebagai pemberian gaji dan tunjangan bagi PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

Pada Tahun 2024, anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme Sistem Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (BPKAD) (SIPD), sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5	02	01	2.06	0000	Pemrosesan Bahan Baku dan Perbaikan Peralatan
---	----	----	------	------	---



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD secara efektif dan efisien. Renja ini mencerminkan komitmen kami dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini memerlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Akhir kata, semoga Renja BPKAD Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Samarinda. Kami terbuka terhadap masukan dan saran konstruktif demi penyempurnaan pelaksanaan Renja ini di masa mendatang.

Terima kasih.